

ANTOLOGI ESAI



MENELISIK DUNIA EKONOMI DAN KEUANGAN

Aslamuddin Lasawedy

MENELISIK DUNIA **EKONOMI** DAN **KEUANGAN**

Aslamuddin Lasawedy



Antologi Esai: Menelisik Dunia Ekonomi dan Keuangan

Indramayu © 2026, CV. Adanu Abimata

Penulis: Aslamuddin Lasawedy
Editor : Silviera Emalyanur Pradini
Desain Cover : Difiyani Puspitasari
Layouter : Muhamad Khoirul Anam

Diterbitkan oleh **CV. Adanu Abimata**

Anggota IKAPI : 354/JBA/2020

Jl. Cimanuk Barat No.27, Sindang, Kec. Sindang,
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kode Pos 45222

Telp : 081221151025

Surel : penerbitadab@gmail.com

Web: <https://Penerbitadab.id>

Referensi | Non Fiksi | R/D

viii + 56 hlm. ; 14 x 20 cm

No. ISBN : 978-634-289-492-7

No. E-ISBN : 978-634-289-493-4 (PDF)

Cetakan Pertama, Mei 2026

Edisi Digital, Mei 2026



Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit.

All right reserved



KATA PENGANTAR

DALAM setiap keputusan ekonomi dan keuangan, manusia sesungguhnya sedang menafsir ulang dirinya sendiri. Ibaratnya seperti berdiri di persimpangan angka dan rasa, logika dan gelisah, hitungan yang sangat kalkulatif dan naluri yang begitu riuh.

Di era ketika data mengalir seperti sungai yang tak pernah tidur, pasar bergerak secepat cahaya, dan kebijakan ekonomi dapat mengubah nasib jutaan orang dalam sekejap. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, manusia tetap saja menjadi pusat dari segala arus kehidupan.

Eonomi, dalam hakikatnya yang paling purba, bukanlah kumpulan rumus yang dingin. Ia adalah cerita tentang beragam pilihan, entah itu memilih, menunda atau menikmati, menyimpan atau membelanjakan, mengendalikan atau dikendalikan. Setiap keputusan finansial mengandung gema moral, dimana setiap angka membawa bayangan masa depan.

Buku kumpulan esai ini lahir dari ruang renung itu. Sebuah perjalanan intelektual yang mencoba membaca denyut ekonomi bukan sekadar sebagai statistik yang bergerak

di layar komputer, melainkan sebagai lanskap batin manusia yang selalu bernegosiasi dengan harapan dan ketakutannya.

Esai-esai di dalam buku ini berusaha menggali apa yang sering tersembunyi di balik keputusan-keputusan ekonomi dan keuangan, baik itu soal nilai, motif, luka, ambisi, pun ilusi dibalik keputusan itu.

Nah, esai-esai ini mengajak pembaca untuk menengok kembali ke jantung persoalan kehidupan manusia. Bagaimana manusia menimbang risiko dan berkah kehidupan. Bagaimana manusia memahami keadilan dalam distribusi. Bagaimana kekuasaan, modal, dan moralitas saling memantulkan bayangannya.

Melalui pendekatan naratif-ilmiah dan sentuhan filosofis, buku ini ingin menjadi kompas kecil. Bukan untuk menunjukkan arah yang pasti, melainkan untuk menajamkan cara kita membaca peta kehidupan. Esai-esainya disusun sebagai cermin yang memantulkan wajah asli ekonomi Indonesia dan dunia keuangan. Pun menjadi jendela untuk melihat Indonesia terkini. Sebab, memahami ekonomi pada akhirnya adalah pantulan bagaimana cara kita memahami hidup, bekerja, bermimpi, dan bertahan hidup.

Semoga buku ini menjadi teman di waktu senggang. Menemani pembaca merenungkan keputusan-keputusan yang telah diambil, yang sedang dijalani, atau yang belum sempat diputuskan. Semoga setiap halaman buku ini membuka cakrawala baru, memperkaya perdebatan, dan menyalakan kembali kesadaran bahwa ekonomi dan keuangan bukan

sekadar profesi atau disiplin ilmu, melainkan medan etika dan kemanusiaan.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan buku ini kepada siapa pun yang percaya bahwa angka pun memiliki jiwa, dan bahwa keputusan ekonomi selalu membawa cerita. Semoga Anda menemukan cerita Anda di dalamnya.(*)

Penulis,

Aslamuddin Lasawedy

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire surface, providing a guide for handwriting or typing. The paper itself is a clean, off-white color.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTARIII

DAFTAR ISI..... VII

Membaca Jalan Berbeda antara Ekonomi Syariah
dan Ekonomi Konvensional..... 1

Fenomena Ekonomi Bawah Tanah,
Menopang Perekonomian Negara..... 6

Bahaya Jerat "Mathiness"
dalam Penerapan Ilmu Ekonomi 11

Menanggung Beban Bersama
Antara Kebijakan Fiskal dan Moneter
Melalui Burden Sharing 15

Paradigma Pertumbuhan Ekonomi
Sudah Ketinggalan Zaman 19

Harmoni Angka dalam Realitas Dunia Bisnis 23

Ceteris Paribus Mengheningkan Ributnya
Variabel Ilmu Ekonomi 26

Kurva yang Tidak Pernah Lahir
dan Berawal dari Nol 29

Waktu yang Bernilai Uang 31

Langkah-Langkah Kecil UMKM di Tengah Badai Besar Ekonomi.....	34
Menelisik Fenomena “Window Dressing”	38
Ketika “Wajar” Secara Keuangan Belum Tentu “Halal”	44
TENTANG PENULIS.....	51
SERTIFIKAT HAKI	55



MEMBACA JALAN BERBEDA ANTARA EKONOMI SYARIAH DAN EKONOMI KONVENSIONAL

SEJATINYA ekonomi konvensional lahir dari asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang mengejar keuntungan dan kepentingan dirinya.

Kepentingan pribadi itu menurut Adam Smith, dianggap dapat secara tidak langsung, menghasilkan kebaikan kolektif melalui mekanisme pasar.

Di lain pihak, ekonomi syariah memulai narasinya dari tempat berbeda, dimana manusia diandaikan bukan saja sebagai individu rasional. Pun juga dipandang sebagai khalifah atau pemegang amanah ilahiyah.

Bagi Al-Ghazali, aktivitas ekonomi itu, sesungguhnya tidak pernah netral. Ia selalu terkait dengan dimensi moral dan spiritual.

Nah, antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah ini, perbedaannya tampak sederhana, namun implikasinya

besar. Ekonomi konvensional bertanya, seputar “apa saja yang bisa menguntungkan ?” Ekonomi syariah justru bertanya, “apa yang benar sesuai norma agama ?”

Ekonomi konvensional berkembang melalui observasi dan model matematis. Ia bersifat terbuka, dinamis, dan terus berubah mengikuti data. Dalam bahasa akademiknya, ia netral secara nilai (*value-neutral*) atau tidak memihak secara eksplisit terhadap nilai-nilai tertentu.

Sebaliknya, ekonomi syariah memadukan rasio dengan wahyu. Prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba dan kewajiban zakat bukanlah hasil eksperimen. Ia adalah norma mutlak yang harus ditaati. Sekalipun, interpretasinya tetap membutuhkan akal, sebagaimana ditunjukkan oleh Ibn Khaldun dalam analisis ekonominya, yang menggabungkan observasi sosial dengan nilai normatif.

Itulah sebabnya Chapra (2000) berpendapat bahwa pendekatan ekonomi syariah memberi arah etik yang jelas dalam menghadapi kompleksitas ekonomi modern.

Dalam praktiknya secara global, ekonomi konvensional sering diukur melalui indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB), produktivitas, dan profitabilitas, dimana pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan utamanya. Namun kritik terhadap paradigma ini, kian lama semakin menguat. Seperti yang diungkapkan Thomas Piketty (2014) yang mengurai bagaimana kapitalisme modern kian hari cenderung menghasilkan ketimpangan ekonomi yang semakin tajam dan dalam.

Pada titik ini, ekonomi syariah menawarkan orientasi berbeda, sebut saja salah satunya keadilan distributif, dimana instrumen seperti zakat dan wakaf dirancang untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu atau orang-orang itu saja.

Tujuan ekonomi syariah, dalam perspektif *maqasid al-shariah*, adalah *Falah* atau kesejahteraan yang dimaknai bukan hanya sekadar materi saja, pun juga bersifat sosial dan spiritual (Dusuki & Abdullah, 2007).

Perbedaan paling konkret antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, bisa dilihat dalam sistem keuangan keduanya. Ekonomi konvensional bertumpu pada bunga, yang memungkinkan uang berkembang tanpa keterlibatan langsung dalam aktivitas produktif.

Sebaliknya, ekonomi syariah melarang riba dan menggantinya dengan skema bagi hasil, yang secara teoritis menciptakan hubungan yang lebih adil antara pemilik modal dan pelaku usaha.

Hanya saja, realitas yang ada, tak selalu ideal. Seperti dicatat Mahmoud El-Gamal (2006), bahwa banyak produk keuangan syariah modern cenderung mereplikasi struktur konvensional dengan modifikasi kontraktual. Kritik ini menyoroti juga, adanya jarak antara yang ideal normatif dengan praktik industrialnya.

Bila ekonomi konvensional cenderung memisahkan ekonomi dari moralitas. Dengan pengandaian, bahwa selama

suatu aktivitas ekonomi berlangsung legal dan efisien, maka itu dianggap sah.

Maka, ekonomi syariah mengedepankan akuntabilitas transendental, dimana setiap transaksi tidak hanya dinilai dari sisi hukum akuntansi, hukum pajak, dan hukum positif saja. Pun juga dinilai dari sisi nilai-nilai moral dan norma agama. Dalam perspektif ini, pelanggaran ekonomi menjadi bukan sekadar kesalahan pasar, juga menjadi pelanggaran etika.

Penelitian oleh Islamic Development Bank (2020) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai-nilai moral dan norma agama ini, melalui instrumen sosialnya seperti zakat dan wakaf, memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan.

Namun belakangan ini, batas antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah, mulai kabur. Konsep seperti *ethical finance* dan *sustainable investing* dalam ekonomi konvensional semakin mendekati nilai-nilai yang telah lama diusung ekonomi syariah.

Di sisi lain, industri keuangan syariah tumbuh pesat secara global, dengan aset mencapai triliunan dolar (IFSB, 2023). Namun pertumbuhan ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah ekonomi syariah masih menjaga ruhnya, atau ia sekadar menjadi variasi dari sistem ekonomi konvensional ?

Catatan Kritis

Di tengah krisis ekonomi global dan meluasnya ketimpangan ekonomi, pertanyaan lama kembali relevan, apakah ekonomi itu hanya tentang angka, atau menyangkut juga tentang nilai ?

Pada akhirnya, perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, bukan hanya pada soal sistemnya, pun juga pada arah tujuannya. Yang satu bergerak dengan logika efisiensi. Yang lain mencoba menyeimbangkannya dengan etika.

Dan...

Di beragam tempat, entah itu di ruang-ruang rapat kantor pemerintah, gedung perwakilan rakyat, dan seterusnya, grafik pertumbuhan ekonomi mungkin terus bergerak naik. Namun di banyak tempat lainnya, rakyat miskin terus mencari sesuatu yang lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi. Yang mereka cari justru keadilan ekonomi, agar hidup mereka lebih beradab.

Dan mungkin, di situlah dua jalan ekonomi ini akan kembali bertemu. Bukan dalam bentuk sistem yang sama, melainkan dalam pencapaian tujuan yang sama. Tujuan yang berkeadilan, mensejahterakan, dan bermanfaat bagi rakyat pada umumnya. Iya gak ? Weleh, weleh, weleh.(*)



FENOMENA EKONOMI BAWAH TANAH, MENOPANG PEREKONOMIAN NEGARA

DINI hari itu, suasana di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sudah berdenyut begitu ramainya. Di antara bau keringat, asap rokok, dan riuhnya pasar, seorang perempuan bernama Imah menggelar lapak kecilnya.

Meja kayunya yang ditutupi kain lusuh itu, posisinya sudah miring. Di atasnya, digelar deretan gorengan, termos kopi, dan pulsa elektronik. Tak ada izin usaha. Tak ada kasir digital. Setiap pagi, di sanalah uang berpindah tangan, dan roda ekonomi terus berputar. Berputar diam-diam tapi nyata. "Kalau harus punya izin, saya nggak sanggup, mas," katanya, apa adanya. "Yang penting bisa makan, bisa sekolahin anak."

Imah bukanlah sebuah pengecualian. Ia adalah bagian dari jantung ekonomi yang tak tercatat. Para ekonom menyebutnya ekonomi bawah tanah (*underground economy*). Wilayah di mana rakyat bekerja tanpa ijazah, tanpa faktur pajak, dan seterusnya. Yang mereka miliki hanyalah harapan.

Di tempat lain di Indonesia, setiap malam, kapal kayu bersandar di pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, membawa hasil laut tanpa dokumen. Di tapal batas Kalimantan, truk batu bara menembus hutan tanpa lampu. Di media sosial, jutaan akun menjual produk tanpa NPWP.

Inilah dunia lain di bawah gemerlapnya ekonomi formal Indonesia, yang berdetak pelan tapi kuat, yang kerap disebut ekonomi bawah tanah (*underground economy*). Ia disebut ilegal, namun ironisnya sering kali menjadi oksigen terakhir bagi rakyat kecil yang terdesak dan terpinggirkan oleh sistem perekonomian yang mapan. Melalui kisah pedagang kaki lima, penambang rakyat, dan pelaku usaha tanpa izin, jelas terlihat sedang berlangsung paradoks keadilan, ketika pelanggaran hukum menjadi cara untuk bertahan hidup, ketika hukum kehilangan empatinya. Fenomena ini menjelaskan bagaimana ekonomi bukan hanya menjadi sekadar urusan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Pun menjadi ruang moral tempat keadilan diuji dan dijalani.

Data Bank Dunia dan Kementerian Keuangan, menyebutkan bahwa lebih dari 43% PDB Indonesia bersumber dari ekonomi informal. Hampir separuh roda ekonomi negeri ini berputar di luar sistem hukum dan pajak. Ironisnya negara sering lalai dan memperlakukan para pelaku ekonomi informal ini seperti hantu yang harus diusir. Padahal mereka adalah warganegara yang perlu diundang ke meja keadilan. Hernando de Soto pernah menulis bahwa kemiskinan di negara berkembang bukan karena rakyatnya malas. Itu terjadi karena hukum menutup akses mereka terhadap legalitas.

LPEM FEB UI mencatat, lebih dari 60 juta pelaku UMKM informal bertahan hidup tanpa subsidi di seantero Indonesia. Mereka tak tercatat dalam data bantuan negara, padahal eksistensi mereka menyelamatkan ekonomi domestik dari kejatuhan dan keterpurukan ekonomi.

Fenomena ini bukannya menjadi madu, malah justru menjadi racun dalam perekonomian negara. Tanpa regulasi, wilayah abu-abu ini juga menjadi ruang bagi pencucian uang, perdagangan ilegal, dan perjudian daring. Menurut PPATK (2024), perputaran uang gelap di Indonesia mencapai Rp1.000 triliun per tahun. Sebuah rekor perputaran uang yang tak bisa lagi dianggap sepele.

Itulah sebabnya, gerak ekonomi di bawah tanah bukan sekadar persoalan antara penegakan hukum dan pelanggaran hukum, pun masalah antara perjuangan untuk bertahan hidup dan pengabaian oleh negara.

Saat pandemi COVID-19 melanda negeri ini, sektor formal ambruk. Namun di gang sempit dan pasar tradisional, ekonomi informal tetap berdenyut. Mereka menjahit masker dari kain sisa, menjual makanan daring, mengantar sembako, dan seterusnya.

Ekonomi bawah tanah bukan sekadar ilegal atau tidak ilegal. Ia adalah ekspresi atau cara rakyat menciptakan dan menjalani hukum mereka sendiri, agar mereka bisa tetap *survive* atau bertahan hidup. Pedagang kaki lima tidak membayar pajak bukan karena melawan, melainkan karena sistem pajak tak pernah berpihak kepada yang lemah. Mereka

tidak punya izin bukan karena membangkang, melainkan karena izin adalah kemewahan birokratis.

Di bawah tanah ekonomi, jutaan orang tetap bekerja. Tak tercatat, tapi nyata. Tak legal, tapi vital. Mereka bukan musuh negara, mereka adalah cermin yang memantulkan apa yang negara lupa, bahwa ekonomi sejati bukan tentang uang, melainkan tentang keberlanjutan hidup manusia.

Filsuf John Rawls menulis bahwa keadilan sosial menuntut “kesetaraan peluang yang nyata.” Bila itu ukuran keadilan, maka ekonomi bawah tanah adalah cermin kegagalan sistem formal, lantaran kebijakan ekonomi formal masih berangkat dari asumsi bahwa semua warganegara harus memiliki identitas hukum, sebut saja rekening bank, literasi digital, dan sebagainya. Padahal, jutaan rakyat tidak hidup di dunia itu. Bagi mereka, kata “izin” adalah sinonim dari “tidak mungkin.” Negara datang dengan pasal, bukan dengan pendekatan humanistik. Razia terus dilakukan, izin diperketat, pajak ditagih.

Simone Weil menulis, “Keadilan bukan kekuasaan, melainkan perhatian.” Mungkin di situlah akar masalahnya di Indonesia dimana negara lebih sibuk mengatur rakyat daripada mendengarkannya.

Ekonomi bawah tanah adalah bahasa rakyat terhadap negara yang tuli. Mereka tidak ingin menentang hukum. Mereka hanya ingin hukum yang bisa bicara dengan logika kehidupan. Selama hukum tak memahami itu semua. Maka ekonomi bawah tanah akan tetap hidup. Karena pada akhirnya, keadilan tidak tumbuh dari pasal, tapi dari empati.

Lantas, bagaimana mengakhiri semua itu ? Pastinya, bukan dengan menindas, melainkan dengan memahami akar sosialnya.

Pertama, permudah lah legalitas. Registrasi usaha mikro harus sesederhana mungkin. Seperti membuka akun media sosial. Pajak disesuaikan dengan realitas, bukan idealitas.

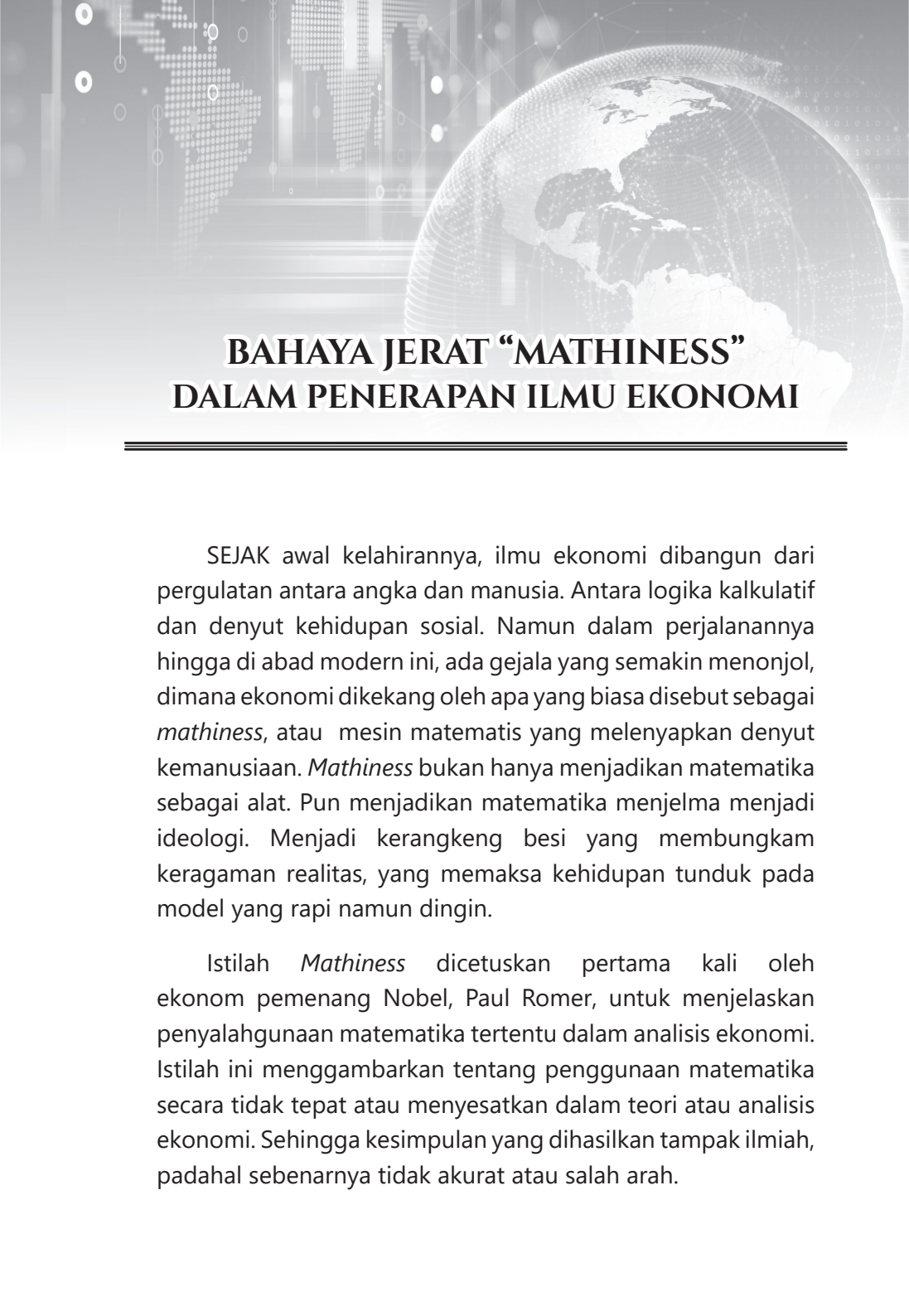
Kedua, akui ekonomi rakyat, seperti halnya Peru dan Kenya, Indonesia bisa menerapkan *simplified legalization* untuk usaha mikro.

Kata "diakui" mengandung makna yang lebih dalam dari pada "dilegalkan." Ia bicara tentang kemanusiaan, tentang hak untuk hidup tanpa rasa takut. Legalitas bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi.

Ke tiga, bangun literasi yang memanusiakan. Literasi ekonomi bukan hanya soal angka. Pun tentang hak, tanggung jawab, dan keadilan.

Ke empat, gunakan prinsip Rawls menyangkut redistribusi peluang, agar kebijakan ekonomi tak boleh hanya menumpuk modal. Pun harus memperluas ruang hidup yang layak bagi rakyat kecil.

Ke lima, tegakkan hukum yang adil, bukan hukum yang menutup ruang gelap, melainkan memberi cahaya agar mereka yang miskin dan terpinggirkan bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. (*)



BAHAYA JERAT “MATHINESS” DALAM PENERAPAN ILMU EKONOMI

SEJAK awal kelahirannya, ilmu ekonomi dibangun dari pergulatan antara angka dan manusia. Antara logika kalkulatif dan denyut kehidupan sosial. Namun dalam perjalanannya hingga di abad modern ini, ada gejala yang semakin menonjol, dimana ekonomi dikekang oleh apa yang biasa disebut sebagai *mathiness*, atau mesin matematis yang melenyapkan denyut kemanusiaan. *Mathiness* bukan hanya menjadikan matematika sebagai alat. Pun menjadikan matematika menjelma menjadi ideologi. Menjadi kerangkeng besi yang membungkam keragaman realitas, yang memaksa kehidupan tunduk pada model yang rapi namun dingin.

Istilah *Mathiness* dicetuskan pertama kali oleh ekonom pemenang Nobel, Paul Romer, untuk menjelaskan penyalahgunaan matematika tertentu dalam analisis ekonomi. Istilah ini menggambarkan tentang penggunaan matematika secara tidak tepat atau menyesatkan dalam teori atau analisis ekonomi. Sehingga kesimpulan yang dihasilkan tampak ilmiah, padahal sebenarnya tidak akurat atau salah arah.

Bila diandaikan ilmu ekonomi itu seperti sebuah kapal besar yang hendak menyeberangi samudra. Maka matematika adalah kompas yang membantu dan menuntun arah kapal. Namun, *mathiness* justru menjadikan kompas itu berhala, hingga membuat nahkoda lupa bahwa lautan bukan garis lurus di atas kertas. Lautan sebenarnya penuh badai, arus, dan gelombang ombak yang tak bisa ditebak. Di sinilah bahaya itu bersemayam, ketika angka tidak lagi sekadar alat untuk membaca dunia. Angka dipuja sebagai kebenaran itu sendiri.

Narasi *mathiness* ini, sering berwujud dalam model ekonomi yang tampak indah, simetris, dan elegan, namun rapuh ketika bertemu dengan kenyataan. Dalam persamaan diferensial dan fungsi utilitas, manusia diperas menjadi "*homo economicus*" yang kaku, seakan-akan seluruh tindakan bisa diringkas dalam kalkulasi matematis. Padahal sejatinya manusia adalah makhluk paradoks. Ia bisa memberi tanpa berharap kembali. Ia bisa mengorbankan keuntungan demi solidaritas. Dan ia bisa menghancurkan dirinya sendiri demi cinta atau ideologi. Amartya Sen (1977) dalam tulisannya "*Rational Fools*" mengingatkan bahwa reduksi manusia menjadi agen rasional yang hanya mengejar kepentingannya adalah bentuk penyempitan yang berbahaya, lantaran mengabaikan peran etika, norma, dan komitmen moral dalam tindakan ekonomi.

Bahaya *mathiness* semakin nyata ketika ia menjadi mesin pengambil keputusan atau kebijakan publik. Model makroekonomi dengan ribuan variabel dapat memberi ilusi kepastian. Seperti cermin yang memantulkan bayangan, namun tak pernah mampu memantulkan seluruh ruang. Ketika krisis finansial 2008 mengguncang dunia, banyak

model matematis yang diagungkan ternyata lumpuh dan tak berguna, lantaran gagal menghitung irasionalitas pasar. Gagal membaca rasa takut, panik, dan euforia yang tak bisa diukur. Steve Keen (2011) dalam *Debunking Economics* menunjukkan bagaimana model neoklasik yang terlalu matematis justru gagal mengenali dinamika utang, ketidakstabilan ekonomi politik, dan non-linearitas sistem keuangan.

Nah, *mathiness* ini tidak lain adalah bentuk *reduksionisme* modern. Ia mereduksi manusia menjadi angka, masyarakat menjadi variabel, dan kehidupan menjadi fungsi linear. Padahal, ekonomi adalah drama peradaban. Panggung tempat etika, politik, budaya, dan spiritualitas ikut menari. Angka memang bisa mengukur pertumbuhan, namun tak bisa mengukur keadilan. Rumus memang bisa menghitung efisiensi, namun tak bisa menimbang makna pengorbanan. Philip Mirowski (1989) dalam *More Heat than Light* bahkan menggambarkan bahwa ekonomi modern terlalu banyak meniru fisika matematis abad ke-19, sehingga melupakan aspek historis dan sosial manusia.

Metafora Plato tentang gua terasa relevan di sini. *Mathiness* adalah bayangan di dinding gua. Rapi, konsisten, memikat, namun bukan kenyataan itu sendiri. Ekonom yang terjebak di dalamnya bisa merasa aman, seakan dunia bisa dikendalikan dengan rumus matematis. Kenyataannya, kehidupan selalu lebih liar daripada model matematis. Penuh ketidakpastian, kejutan, dan paradoks. Sehingga membebaskan diri dari *mathiness* berarti berani keluar dari gua, menatap realitas matahari.

Kesadaran akan bahaya *mathiness* ini, tidak berarti menolak matematika. Justru matematika tetap penting sebagai bahasa formal yang membantu kita memahami kompleksitas realitas. Ia harus diposisikan sebagai pelayan, bukan tuan. Ia menjadi jembatan, bukan tujuan.

Ilmu ekonomi mestinya perlu mengakui kembali multidimensi manusia dalam berbagai konteks, sebut saja ; emosi, moral, sejarah, bahkan spiritualitas, yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan dalam model kuantitatif. Seperti ditekankan Dani Rodrik (2015) dalam *Economics Rules*, bahwa model hanyalah peta, bukan wilayah itu sendiri. Kegagalan muncul ketika kita lupa bahwa realitas selalu lebih kaya daripada peta.

Pada akhirnya, ekonomi bukanlah sekadar ilmu tentang angka. Ekonomi adalah ilmu tentang manusia yang hidup dalam jaringan makna. Bahaya *mathiness* adalah bahaya ketika kita mengganti wajah manusia dengan angka. Mengganti etika dengan fungsi utilitas.

Jika kita tidak waspada, ilmu ekonomi akan berubah menjadi mesin tanpa hati, yang berjalan rapi namun kehilangan arah. Dan sebuah kapal, betapapun indah kompasnya, tetap akan karam jika ia melupakan laut sesungguhnya yang begitu ganas dan penuh misteri.(*)



MENANGGUNG BEBAN BERSAMA ANTARA KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER MELALUI BURDEN SHARING

AMBIL contoh sebuah keluarga besar yang tengah menghadapi musim paceklik. Ayah yang biasanya bekerja keras (pemerintah) tiba-tiba kehilangan pemasukan besar. Ibu yang biasanya menjaga tabungan keluarga (bank sentral) akhirnya turun tangan, lantaran anak-anak butuh makan. Akhirnya, ibu membuka celengan rahasia, agar dapur terus berasap. Begitulah perumpamaan *burden sharing* dalam makna paling sederhana yaitu bagaimana berbagi beban agar kehidupan perekonomian negara tidak terhenti.

Dalam literatur ekonomi makro dan kebijakan publik, terdapat perdebatan panjang mengenai bagaimana fiskal dan moneter harus berinteraksi, terutama dalam situasi krisis, defisit besar, atau kebutuhan mendesak (seperti pandemi). Lalu muncullah instrumen *burden sharing*, yang menjadi salah satu instrument mengatasi krisis ekonomi. Burden sharing tidak lain adalah pembagian tanggung jawab atau beban antara pemerintah (fiskal) dan bank sentral (moneter).

Implementasinya membawa manfaat sekaligus risiko yang perlu dikaji secara serius dari sisi teori dan empiris.

Tahun 1998, Indonesia pernah menari di panggung krisis. Badai moneter Asia menghantam keras. Nilai rupiah runtuh seperti daun kering diterpa angin. Sejumlah bank berguguran. Rakyat mengantri minyak goreng seperti mencari setetes cahaya di tengah gelap. Saat itu, *burden sharing* belum hadir sebagai konsep formal. Bank sentral masih terseret dalam tarikan fiskal yang kacau. Hasilnya, inflasi melonjak. Kepercayaan runtuh. Pengalaman ini memberi pelajaran, betapa mahal harga yang harus dibayar jika dinding pemisah moneter dan fiskal runtuh tanpa kendali.

Lalu tibalah pandemi 2020, sebuah badai yang tak kasat mata. Kali ini Indonesia mencoba jalur berbeda. Pemerintah dan Bank Indonesia duduk satu meja, merundingkan cara terbaik, agar ekonomi tidak tenggelam dalam keterpurukan. Maka lahirlah kesepakatan *burden sharing*, dimana bank sentral membeli obligasi pemerintah untuk membiayai kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan perekonomian negara. Dalam sekejap, kebijakan ini menjadi pelampung di samudera perekonomian yang mendadak ganas. Bedanya dengan 1998, kali ini tali tambatan dipasang dengan aturan yang jelas, seperti ; transparansi, batasan, dan kesadaran bahwa ini hanya jalan darurat, bukan jalan permanen.

Manfaat dari kebijakan ini begitu terasa, terutama ketika badai krisis ekonomi menerpa. Seperti payung besar yang terbuka di tengah hujan deras. *Burden sharing* melindungi rakyat dari derasnya keterpurukan. Pemerintah mendapat ruang fiskal untuk memberi subsidi, menjaga dunia usaha,

dan memastikan rakyat kecil tetap bisa membeli beras meski harga-harga bergejolak.

Filosofi *burden sharing* ini begitu sederhana bahwa hidup bersama berarti berbagi. *Burden sharing* menjadi penting, lantaran apalah artinya sebuah bank sentral menjaga nilai uang bila rakyatnya tidak mampu membeli makanan ? Apa gunanya pemerintah berhutang ke pasar modal dengan bunga mencekik bila di dalam negeri ada tangan yang bisa menopang ? *Burden sharing* menyelamatkan bangsa dengan solidaritas kelembagaan. Sebuah cermin bahwa akal sehat dan nurani bisa berjalan beriringan.

Meski *burden sharing* ini sangat bermanfaat. Ia juga menyimpan potensi bahaya. Ibaratnya seperti lilin yang terlalu lama dibiarkan menyala. Ia memang memberi terang. Namun, bila lupa diawasi, ia bisa membakar rumah.

Selain itu, risiko inflasi selalu mengintai. Likuiditas yang melimpah dari dukungan moneter bisa membuat nilai uang terkikis. Bagi rakyat kecil, kenaikan harga kebutuhan pokok lebih menyakitkan daripada angka defisit yang tertulis di laporan keuangan negara. Di sinilah nampak paradoksnya bahwa kebijakan yang dirancang untuk melindungi rakyat, bisa berbalik melukai rakyat bila tidak dijalankan dengan hati-hati.

Risiko lainnya lebih halus tapi tak kalah berbahaya yaitu erosi disiplin. Bila pemerintah terlalu sering ditolong bank sentral, ia bisa terlena, lantaran merasa selalu ada bahu yang siap memikul beban, yang bisa berakibat pada kehilangan keberanian untuk mengendalikan defisit dan utang. Ibaratnya seperti sebuah perahu yang tak pernah belajar menantang

ombak karena tahu selalu ada kapal penyelamat yang siap menolong. Pada akhirnya, jiwa kemandirian bisa terkikis oleh kebiasaan bergantung.

Nah, apa pun itu, *burden sharing* mengajarkan kita tentang keseimbangan. Ia bukanlah tongkat ajaib yang bisa selamanya menopang ekonomi. Ia hanya sekadar penopang darurat ketika jalan terjal. Ada saatnya perahu memang butuh tali tambatan, tetapi tambatan itu harus dilepas kembali begitu badai reda.

Sejarah Indonesia memberi pelajaran, bahwa petaka datang lantaran ketiadaan koordinasi mengatasi krisis tahun 1998. Tahun 2020, solidaritas yang terukur memberi harapan. Maka jawabannya bukan menolak atau mengagungkannya, melainkan menyeimbangkan, antara keberanian menolong dan kebijaksanaan untuk tahu kapan harus berhenti.

Pada akhirnya, *burden sharing* adalah cermin dari hakikat hidup itu sendiri. Kita semua, sebagai bangsa, hanyalah penumpang di perahu yang sama. Bila badai datang, kita harus rela berbagi beban, entah sebagai nakhoda, sebagai penjaga logistik, atau sebagai awak yang mengayuh dayung. Namun, kita juga harus sadar bahwa perahu ini tidak bisa selamanya ditopang oleh pertolongan darurat. Setelah badai reda, layar harus dikembangkan kembali, dan semua penumpang harus belajar menyeimbangkan langkah.

Maka, manfaat dan kekurangan *burden sharing* bukan sekadar soal ekonomi, melainkan soal hikmah. Kapan kita harus saling menolong. Kapan kita harus kembali berdiri di atas kaki sendiri.(*)



PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI SUDAH KETINGGALAN ZAMAN

SELAMA lebih dari satu abad, pertumbuhan ekonomi telah menjadi mantra suci peradaban modern. Ia diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Dibanggakan dalam pidato politik. Dijadikan tolok ukur keberhasilan, dan disembah layaknya dewa yang tak pernah dipertanyakan kebenarannya. Namun kenyataannya hari ini, sebagaimana semua mitos yang pernah mendominasi sejarah manusia, ia pun menghadapi ujian seputar relevansinya yang mulai usang.

Sepertijam matahari di era jam atom, ukuran pertumbuhan ekonomi yang pernah revolusioner kini menjadi instrumen yang tak lagi tepat membaca realitas zaman. Dunia telah berubah, tetapi ukuran kebahagiaan dan keberhasilan manusia masih terjebak dalam angka-angka yang hanya menghitung produksi barang dan jasa, tanpa menimbang rusaknya hutan, lenyapnya spesies, dan hancurnya keseimbangan sosial.

Pertumbuhan ekonomi ibarat mesin raksasa yang lapar. Ia membutuhkan bahan bakar berupa konsumsi tanpa henti, eksploitasi sumber daya, dan percepatan produksi. Mesin ini diciptakan di abad ke-18, pada masa Revolusi Industri, ketika bumi dianggap tak terbatas dan langit seolah tak pernah muram.

Namun kini, kita hidup di era *planetary boundaries*, dimana batas-batas ekologis tak bisa dilanggar tanpa konsekuensi. Ketika hutan hujan berubah menjadi perkebunan monokultur. Ketika sungai menjadi saluran limbah. Ketika atmosfer menjadi penjara gas rumah kaca. Itulah sebabnya pertumbuhan ekonomi bukan lagi tanda kemajuan. Ia kini menjadi gejala penyakit kronis, yaitu *overdevelopment*.

Herman Daly, seorang filsuf ekonomi, menyebutnya sebagai *uneconomic growth* atau pertumbuhan yang biayanya (kerusakan ekologis, ketimpangan sosial, degradasi mental) lebih besar daripada manfaatnya. Dengan kata lain, pertumbuhan itu sendiri telah menjadi kontradiksi.

Secara ilmiah, PDB tidak pernah dirancang untuk mengukur kesejahteraan. Simon Kuznets, perancang konsep PDB modern pada 1930-an, telah memperingatkan bahwa "kesejahteraan suatu bangsa tidak dapat disimpulkan hanya dari pendapatan nasional." Namun peringatan itu tenggelam dalam euforia pasca-Perang Dunia II, ketika industrialisasi dipandang sebagai tiket menuju kemakmuran.

Kini, ekonomi modern menuntut indikator baru, yang tak hanya menghitung "lebih banyak," pun juga "lebih baik." Beberapa pendekatan baru sudah lahir, seperti ; Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), Genuine Progress Indicator (GPI), hingga Gross National Happiness (GNH). Kesemuanya itu, menandai pergeseran paradigma bahwa keberhasilan pembangunan tak lagi menyangkut soal laju pertumbuhan ekonomi, pun menyangkut kualitas hidup, kesehatan ekosistem, keadilan sosial, dan seterusnya.

Nah, ketergantungan pada pertumbuhan ekonomi itu mencerminkan ilusi modernitas, bahwa semua yang penting dapat dihitung, dan semua yang dapat dihitung adalah penting. Padahal, kehidupan manusia sarat dengan hal-hal yang tak dapat dimasukkan ke dalam neraca nasional. Sebut saja ; kedamaian batin, keindahan senja, rasa memiliki komunitas, atau ketenteraman saat tidur tanpa rasa cemas.

Pertumbuhan ekonomi ini tidak lain adalah upaya menukar "kehidupan" dengan "produktivitas," mengganti kebijakan ekologis dengan logika akumulasi, dan mengganti masa depan generasi mendatang dengan keuntungan jangka pendek.

Menyatakan pertumbuhan ekonomi ketinggalan zaman bukan berarti memuja kemiskinan atau menolak kemajuan. Sebaliknya, ia adalah seruan untuk beranjak menuju *post-growth economy* atau ekonomi yang memprioritaskan keberlanjutan ekosistem, pemerataan kesejahteraan, dan keseimbangan kualitas hidup. Dalam paradigma ini, keberhasilan negara tidak diukur dari seberapa cepat ia tumbuh, tetapi seberapa lama ia mampu menjaga kehidupan agar tetap layak huni.

Ekonomi pasca pertumbuhan mengajarkan bahwa bumi bukan sekadar "faktor produksi" melainkan rumah satu-satunya yang kita miliki. Ia mendorong teknologi yang ramah

lingkungan, distribusi kekayaan yang adil, dan konsumsi yang sadar. Di sini, pertumbuhan bukan lagi tujuan, melainkan salah satu dari sekian banyak alat, dan sering kali bukan yang utama.

Ringkasnya, segala mitos seputar pertumbuhan ekonomi perlu digantikan. Ia seperti peta kuno yang masih menggambarkan laut penuh monster. Meskipun tak bisa disangkal bahwa paradigma pertumbuhan ekonomi pernah berguna, tetapi kini ia boleh dikata menyesatkan.

Dunia abad ke-21 membutuhkan kompas baru. Sebuah ukuran baru yang menghargai keseimbangan ekologis, kebahagiaan manusia, dan keberlanjutan lintas generasi.

Jika pertumbuhan ekonomi adalah lagu yang pernah menginspirasi umat manusia. Kini saatnya kita mengganti nadanya. Bukan lagi simfoni tentang "lebih banyak dan lebih cepat," tetapi tentang "cukup, adil, dan lestari." Dan barangkali, kebijaksanaan terbesar yang bisa kita wariskan adalah keberanian untuk mengatakan bahwa pertumbuhan bukan lagi masa depan. Ia adalah masa lalu yang sudah kita lewati.(*)



HARMONI ANGKA DALAM REALITAS DUNIA BISNIS

Akuntansi, hakikatnya adalah meditasi tentang realitas yang disaring menjadi angka-angka. Dari jurnal hingga neraca akhir, kita tidak hanya melihat dan menyusuri angka-angka. Disana kita mendapati nilai, etika, dan eksistensi.

Seorang akuntan bukan hanya penjaga angka, tetapi penulis sejarah ekonomi, penyusun simfoni nilai, dan penjaga etika dunia usaha. Dalam riuh lembar kerja kantor akuntan, berlangsunglah salah satu proses paling filosofis dalam dunia modern. Harmoni dalam angka. Di sanalah dunia usaha menari di atas panggung transaksi. Namun, agar tarian itu tak kehilangan ritme, dibutuhkan tangan-tangan bijak yang mampu menuliskannya ke dalam catatan abadi

Di sinilah akuntansi hadir, bukan sekadar ilmu pasti, melainkan seni menafsirkan nilai. Filsafat tentang tanggung jawab, keteraturan, dan kejujuran. Akuntansi adalah bahasa

bisnis, tetapi ia juga bisa menjadi bahasa kebenaran, jika ditulis dengan hati yang jernih dan pena yang adil.

Jurnal Adalah Titik Awal dari Ingatan Kolektif

Segalanya bermula dari jurnal. Tempat pertama kali transaksi yang fana dijadikan abadi. Seperti penyair mencatat perasaannya ke dalam bait-bait puisi, akuntan menulis jejak peristiwa ke dalam debit dan kredit. Setiap angka yang tertulis dalam jurnal bukan sekadar nilai. Ia adalah kisah tentang keputusan, risiko, dan harapan. Di sinilah filsafat pencatatan bermula bahwa setiap tindakan transaksi ekonomi harus dikenang, agar tak ada dusta dalam angka.

Menyusun Simfoni Keuangan Dalam Buku Besar

Setelah tercatat dalam jurnal, transaksi itu melanjutkan perjalanannya ke buku besar, yang berisi lembaran-lembaran tebal yang menyusun simfoni keuangan. Di sinilah kisah-kisah transaksi disusun menurut tokohnya, sebut saja ; kas, piutang, utang, modal, dan beban. Akuntan bagaikan komponis, memastikan harmoni dari setiap akun, agar tidak ada nada yang sumbang, tidak ada tokoh yang terlalu dominan. Ini bukan sekadar teknik, tapi etika. Buku besar mengajarkan kita bahwa setiap bagian memiliki tempat, dan keseimbangan. Sebuah hukum alam semesta yang ada dalam dunia keuangan.

Cermin Keseimbangan Pada Neraca Saldo

Dari buku besar, lahirlah neraca saldo. Cermin jernih yang menunjukkan apakah semesta angka berada dalam keseimbangan. Jika debit dan kredit setara, maka tercapailah

momen zen atau keselarasan dalam akuntansi. Bila tidak, maka seperti filsuf yang mencari kebenaran, akuntan pun harus menelusuri jejak langkahnya. Mengurai benang kusut transaksi hingga ditemukan harmoni yang hilang. Neraca saldo adalah titik refleksi. Tempat kita bertanya, sudahkah kita berlaku jujur pada angka?

Narasi Akhir Sebuah Tahun Dalam Laporan Keuangan

Dari proses panjang itulah tercipta laporan keuangan. Sebuah narasi akhir tahun yang tak hanya berbicara dalam angka, tapi juga dalam makna. Laba rugi, neraca, perubahan ekuitas, semuanya menjelma menjadi cermin eksistensial entitas. Apakah modal bertumbuh? Apakah ada laba yang bisa ditahan? Apakah ia telah mengelola titipan modal dengan bijaksana?

Neraca Akhir Adalah Penutup yang Mencerahkan

Neraca akhir adalah puisi yang tuntas. Ia menutup perjalanan siklus akuntansi dengan harmoni. Aset yang setara dengan liabilitas dan ekuitas adalah pernyataan bahwa kehidupan bisnis, seperti hidup manusia, selalu mencari keseimbangan. Di sinilah akuntansi menunjukkan sisi terdalamnya. Ia bukan sekadar sistem pencatatan, tetapi refleksi moral tentang tanggung jawab, transparansi, dan keberlanjutan.(*)



CETERIS PARIBUS MENGHENINGKAN RIBUTNYA VARIABEL ILMU EKONOMI

Manusia adalah makhluk bebas. Keinginan dan tindakannya berkelindan dengan kompleksitas hidupnya yang tak ada ujungnya. Dalam denyut dunia perekonomian yang tak pernah berhenti berubah, ilmu ekonomi berusaha membisikkan ketertiban di tengah kacaunya perekonomian. Untuk memahaminya, ilmu ekonomi menggenggam satu azimat kuno, *ceteris paribus*, yang mengandaikan semua hal lain tetap konstan dan tidak berubah selain variabel yang dianalisis.

Ini bukan sekadar siasat teknis. Ia merupakan pendekatan filosofis terhadap kenyataan perekonomian yang cair. Lantas, mengapa ekonomi membutuhkan pengandaian ini? Karena tanpa diamnya dunia, tak mungkin kita mendengar bisikan satu atau dua variabel di antara gemuruh beribu-ribu variabel lainnya.

Ilmu ekonomi, layaknya seorang filsuf yang menatap kabut, memahami bahwa realitas terlalu rumit untuk ditangkap sekaligus. Ia memilih, dengan rendah hati, untuk membekukan semesta dalam waktu. Membiarkan satu atau dua variabel saja bicara. Sementara variabel lain diam, patuh dalam kekakuan hipotesis. Ini bukanlah pengkhianatan terhadap kompleksitas dunia. Ini merupakan penghormatan terbaik, dengan membatasi gerak beragam variabel ekonomi, agar kita dapat mendekati pemahaman yang lebih realistis dan ilmiah.

Dalam puisi analisis, *ceteris paribus* adalah bait yang mengatur ritme. Ia memberikan ruang bagi satu nada untuk menggema. Bagaimana harga mempengaruhi permintaan. Bagaimana upah mendorong penawaran. Seolah-olah dalam semesta yang begitu luas ini, bersih dari gangguan. Tanpa *ceteris paribus*, setiap sebab akan tenggelam dalam lautan akibat. Setiap jawaban menjadi gumaman samar.

Ceteris paribus mengajarkan kerendahan hati yang ilmiah. Bahwa setiap kesimpulan yang lahir darinya hanyalah peta, bukan wilayahnya. Dunia nyata, tempat beragam variabel puspa warna saling tarik menarik tanpa ampun, menuntut kita untuk terus waspada. Kebenaran dalam ekonomi adalah bayangan dari kenyataan. Bukan kenyataan itu sendiri.

Dalam pengertian yang luas, *ceteris paribus* adalah pengakuan bahwa untuk memahami dunia, kadang kita harus berani menyederhanakannya. Ia adalah jembatan antara kekacauan kehidupan perekonomian dan keteraturan akal budi. Antara ributnya pasar dan tenangnya teori.

Itulah sebabnya, dalam setiap grafik permintaan yang menurun, dalam setiap prediksi inflasi yang dihitung, bergetar filosofi kecil ini, bahwa di balik segala kerumitan dunia, ada sebuah pola disana. Bahwa di tengah kebisingan perekonomian, kita masih percaya dan meyakini akan adanya harmoni, meski hanya sejenak. Di saat itulah *ceteris paribus* menjadi penting dan bermakna.(*)



KURVA YANG TIDAK PERNAH LAHIR DAN BERAWAL DARI NOL

Ilmu Ekonomi, dengan segala rasionalitasnya, mengakui satu hal yang metafisis, bahwa manusia adalah makhluk kelaparan. Bukan saja kelaparan akan makanan dan air. Pun perlindungan, kehangatan, keamanan, dan seterusnya. Konsumsi dasar inilah, yang dalam teori ekonomi disebut konsumsi otonom. Sebuah beban dan anugerah yang dibawa setiap jiwa, sebelum ia mampu menghasilkan selembar uang.

Dalam ruang tempat ilmu ekonomi mencoba menggambar dunia, ada satu kurva sederhana yang bicara dengan kejujuran purba. Ia tidak pernah lahir dari titik nol, sebagaimana manusia tidak pernah lahir tanpa kebutuhan. Para ekonom menyebutnya Kurva Konsumsi.

Kurva Konsumsi ini tidak pernah dimulai dari titik nol. Alasannya sederhana, karena hidup itu sendiri tidak pernah bisa menunggu syarat. Ia adalah ekspresi pengakuan ilmu ekonomi yang paling jujur. Bahwa keberadaan manusia di muka bumi ini, menuntut dunia untuk menyediakan segala

kebutuhan manusia terlebih dahulu, sebelum dunia menuntut manusia untuk memberi.

Kurva itu melengkung halus, setia, dan sedikit angkuh. Selalu mulai sedikit di atas kehampaan. Seolah berkata, "Sebelum engkau mengisi, ada sesuatu yang harus dipenuhi. Sebelum dunia bergerak, ada tuntutan diam yang tidak bisa diabaikan."

Metafora kurva konsumsi ini, laksana akar pohon yang tumbuh dari tanah yang tandus. Ia harus ada dulu, bahkan sebelum batangnya menjulang atau daun-daunnya merindukan matahari. Konsumsi adalah akar eksistensi. Tanpa itu, pertumbuhan apa pun hanyalah ilusi.

Jika ekonomi adalah simfoni, maka konsumsi otonom adalah nadanya yang pertama. Getar lembut pertama yang membangunkan dunia dari diam. Tanpa konsumsi pada nol pendapatan, ekonomi hanyalah lukisan tanpa warna. Mesin tanpa bahan bakar. Jiwa tanpa tubuh.

Lebih jauh lagi, kurva konsumsi yang bermula di atas titik nol ini, adalah perwujudan filosofis ketidaklengkapan manusia, yang sejak lahir bergantung, membutuhkan, dan perlahan tapi pasti mengukir kemandirian.

Di lintasan sejarah setiap individu pun masyarakat selalu saja konsumsi mendahului produktivitas. Sebuah kebutuhan yang mendahului penciptaan. Maka, saat kita memandang kurva konsumsi, jangan hanya lihat garis dan angkanya. Lihatlah nyawa yang bergetar di dalamnya. Sebuah ungkapan bahwa sebelum manusia mampu bermimpi tentang masa depannya, ia harus terlebih dahulu bertahan hidup di hari ini.

(*)



WAKTU YANG BERNILAI UANG

Dalam arus sejarah yang tak terbendung yang disebut waktu. Manusia melukis makna pada setiap detik yang lewat. Waktu, di cakrawala ekonomi, bukan sekadar bayangan yang melewati jam dinding. Ia adalah sang penentu nilai. Penyeimbang mimpi dan realitas. Sang hakim yang tak kasat mata dari keputusan-keputusan besar dan kecil di panggung ekonomi.

Inilah kisah tentang nilai waktu atas uang (*Time Value of Money*). Sebuah konsep yang lebih luas maknanya dari sekadar rumus bunga majemuk atau grafik keuangan. Ia adalah filsafat dalam angka. Puisi dalam strategi. Drama dalam pilihan.

Bayangkan, selembar uang di tangan seorang bocah, yang langsung bisa ditukar menjadi sebungkus permen. Membuat bocah itu tertawa riang di sore yang panjang. Namun, andaikan selembar uang itu disimpan dan ditabung. Lalu biarkan berkembang dalam sarang bunga majemuk. Kelak ia akan menjadi lebih dari sekadar permen. Ia bisa jadi tiket berwisata, modal usaha, atau bahkan menjadi berkah

kebebasan finansial seseorang. Uang hari ini tidak setara dengan uang hari esok, lantaran waktu memperlakukannya seperti tanah memperlakukan benih. Bila sabar memupuknya dari waktu ke waktu, ia akan tumbuh menjadi pohon uang yang menaungi harapan.

Apakah ini keadilan ? Apakah bijak menilai sesuatu bukan dari bentuknya, melainkan dari kapan ia hadir ? Namun ilmu ekonomi tidak tunduk pada romantika. Ia percaya pada potensi, pada kemungkinan yang tersembunyi di balik waktu. Satu rupiah hari ini adalah janji. Dan janji itu nilainya lebih dari mimpi tanpa waktu.

Dalam drama kehidupan ekonominya, manusia selalu berada di persimpangan, antara menikmati hari ini atau menabung untuk hari esok. Ada godaan hedonistik untuk membakar uang demi kesenangan sesaat. Ada pula kekuatan asketik yang memilih menahan, menanam, menunggu. *Time value of money* menuntut kita menjadi nabi dan petani sekaligus. Meramal masa depan ekonomi yang gemilang, sembari bercocok tanam dalam ketidakpastian.

Nah, kearifan dari konsep ini, mengajarkan tentang keterbatasan. Ia mengingatkan kita bahwa tak ada waktu yang abadi. Setiap hari yang lewat adalah bunga yang gugur dari mahkota uang. Semakin lama kita menunda, semakin mahal harga dari waktu dan kesempatan yang hilang. Uang yang tidak digunakan, yang tidak tumbuh, menjadi hampa. Membisu dalam saku waktu yang tertinggal.

Time value of money bukan hanya teori akuntansi. Ia adalah meditasi tentang hidup. Ia menyuruh kita untuk

menghargai waktu. Tidak menganggap remeh nilai dari satu hari, satu jam, bahkan sedetik sekalipun. Dalam dunia yang begitu sibuk mengejar hasil. Ia berkata: tunggulah, sabarlah, tanam dan investasikanlah uangmu hari ini untuk panen uang di hari esok.

Dan ...

Seperti waktu itu sendiri, nilai uang adalah ilusi yang menjadi nyata hanya dalam tindakan. Maka hiduplah seperti investor agung. Investor atas waktumu, keputusanmu, dan masa depanmu. Karena pada akhirnya, bukan berapa uang yang kita punya yang penting. Tapi berapa lama kita dapat bertahan hidup dari uang yang kita miliki hari ini. Berapa banyak uang yang mampu kita hasilkan dari setiap detik yang kita miliki.(*)



LANGKAH-LANGKAH KECIL UMKM DI TENGAH BADAI BESAR EKONOMI

BADAI ekonomi datang silih berganti seperti gelombang tanpa musim. Harga bahan baku melonjak, daya beli menurun, kebijakan pemerintah berubah arah, dan pasar global berputar terlalu cepat sehingga sulit untuk diikuti. Di tengah kekacauan ekonomi itu, UMKM berdiri seperti perahu kecil di tengah samudra yang mengamuk.

Namun yang membuat mereka tetap bertahan bukanlah kekuatan mesin uang. Kekuatan mereka adalah keikhlasan dan ketulusan. Mereka berbisnis dengan doa di antara gelombang masalah yang begitu ganas. Kekayaan mereka hanyalah harapan yang menjadi jangkar dan penuntun arah hidupnya.

Mereka bukan sekadar penggerak ekonomi. Mereka adalah denyut nadi kehidupan ekonomi yang paling nyata. Dari dapur rumah hingga kios pinggir jalan, dari bengkel kecil hingga toko daring yang dikelola dengan sinyal seadanya, mereka menjalani kehidupan ekonomi yang sesungguhnya.

Setiap hari, mereka menjalankan bisnisnya tanpa kepastian. Bila malam tiba, mereka kerap merenung dan menimbang-nimbang antara modal yang menipis dan biaya hidup yang terus bergerak naik. Nah, di balik segala keterbatasan itu, mereka justru tidak berhenti melangkah. Mereka terus mengayunkan langkahnya, meski tertatih-tatih. Bagi mereka tak ada pilihan lain selain bertahan hidup. Ini bukan ekspresi kegagalan bertumbuh dan berkembang ditengah dunia yang diatur oleh algoritma dan statistik. Bertahan hidup adalah ekspresi cinta mereka pada kehidupan. Cinta pada keluarga. Cinta pada tanah tempat mereka berpijak. Bagi UMKM, bertahan hidup adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan hidupnya.

Begitulah UMKM bertahan hidup di ruang di mana logika ekonomi terkadang berhenti bekerja. Di sana, efisiensi bukan diukur dari kecepatan berbisnis. Efisiensi justru diukur dari ketulusan dan keikhlasan mengais rejeki. Mereka tahu bahwa menolak menyerah adalah satu-satunya bentuk kemewahan yang tersisa. Seperti akar pohon yang menembus tanah tandus demi mencari air. Mereka mencari nafkah dalam diam, lantaran mereka tahu, kehidupan selalu bersembunyi di bawah permukaan yang keras.

Mereka mengajarkan kepada kita bahwa ekonomi bukan hanya soal perhitungan rugi-laba saja. Pun juga pergulatan eksistensial manusia dengan nasibnya. Bahwa di balik setiap rupiah yang berputar, ada cerita tentang pilihan hidup, keberanian, dan pengorbanan.

UMKM bukan objek pembangunan. Mereka adalah subjek kehidupan. Mereka adalah pelaku ekonomi yang paling jujur, karena setiap rupiah yang mereka hasilkan berasal dari tenaga, waktu, dan cinta mereka terhadap kehidupan.

Jika raksasa bisnis atau konglomerasi adalah arus sungai yang deras, maka UMKM adalah mata airnya. Tanpa mereka, arus besar itu akan kehilangan sumbernya. Kehilangan kesegarannya. Kehilangan moralnya.

Dari pengalaman berbisnis UMKM, kita belajar bahwa kesejahteraan tidak bisa diukur hanya dengan akumulasi kekayaan. Kesejahteraan justru diukur dari seberapa banyak manusia yang masih mampu tersenyum di tengah kesempitan peluang berbisnis.

Kita telah begitu lama memuja angka dan grafik. Padahal di balik setiap angka pertumbuhan ekonomi, ada manusia pelaku UMKM yang sedang menggigil penuh ketidakpastian menunggu pelanggan.

UMKM mengingatkan kita bahwa ekonomi bukan sistem, melainkan ekosistem. Ekonomi bukan pasar tanpa wajah, melainkan wajah-wajah pelaku bisnis yang sedang berjuang menjaga harga diri. Denyut ekonomi sejati bukan hanya tentang produksi dan konsumsi. Pun tentang keberlanjutan bisnis UMKM di tengah badai krisis ekonomi.

Para pelaku bisnis UMKM mungkin tidak mengenal istilah *supply chain*, *venture capital*, atau *AI-driven marketing*. Namun mereka mengenal konsep yang lebih tua dari semua teori

ekonomi, bahwa keikhlasan dan ketulusan itu sangat berarti bagi kebaikan hidup bersama.

UMKM adalah penjaga moral ekonomi bangsa. Mereka menolak untuk menyerah, menolak untuk culas, dan tetap jujur berbisnis meski dunia tak lagi adil. Setiap roti yang dipanggang, setiap anyaman yang dijual, setiap jasa yang ditawarkan, adalah bentuk kecil dari pengabdian mereka. Di sana, kerja bukan sekadar alat untuk bertahan hidup. Kerja adalah cara manusia meneguhkan makna keberadaannya di dunia.

Badai ekonomi mungkin terus datang, menggulung satu per satu harapan para pelaku bisnis UMKM. Namun selama masih ada satu warung yang bertahan di ujung gang, selama masih ada satu pengrajin yang tidak berhenti memahat, selama masih ada satu pedagang yang tetap tersenyum pada pembeli pertamanya, maka api kehidupan belum padam.

UMKM adalah bara kecil kehidupan perekonomian negara. Kecil, tapi hangat. Tidak menyala terang, tapi cukup untuk menjaga bangsa ini agar tidak membeku. Dan mungkin, di sanalah rahasia terbesar kehidupan perekonomian bahwa kekuatan sejati bukan pada pelaku bisnis yang berlari cepat. Pun juga pada mereka yang tetap melangkah, meski itu langkah kecil di tengah badai ekonomi yang seolah tak pernah usai.(*)



MENELISIK FENOMENA “WINDOW DRESSING”

DALAM literatur akuntansi, *window dressing* didefinisikan sebagai tindakan manipulatif yang bertujuan mempercantik laporan keuangan atau portofolio kinerja perusahaan menjelang periode akhir pelaporan. Dalam konteks Indonesia, praktik ini bukan hanya persoalan teknis akuntansi. Ia adalah fenomena sosial, gejala psikologis organisasi, dan ritual ekonomi yang berulang setiap akhir tahun buku.

“*Window dressing* itu seperti parfum. Tidak terlihat, tapi tercium. Ketika rasio leverage membaik tanpa alasan ekonomi yang kuat, kami tahu ada sesuatu yang digeser. Kalau bukan beban, ya kewajiban,” ujar Roni, seorang Analis Pasar Modal.

Sejumlah studi empiris di Indonesia mengindikasikan bahwa *window dressing* bukanlah mitos atau sekadar rumor pasar. Studi Burchan & Rahmawati (UI, 2021) misalnya, menemukan pola abnormal spike pada rasio likuiditas (current ratio) menjelang akhir tahun pada 37% perusahaan

manufaktur BEI. Lonjakan itu mereda kembali pada kuartal berikutnya.

Penelitian Fajri & Wicaksana (UGM, 2019) mendeteksi praktik pengaturan akun piutang dan penundaan pengakuan beban menjelang audit di perusahaan sektor ritel, dengan deviasi rata-rata 12–18% dari kondisi riil.

Sementara studi OJK (Laporan Pengawasan 2023) menyebut 64 temuan indikasi *financial misrepresentation*, termasuk rekayasa rasio kredit bermasalah (NPL), pengalihan aset macet ke entitas afiliasi, hingga transaksi repo jangka pendek menjelang tutup buku perbankan.

Fenomena-fenomena ini merupakan jejak digital dari sesuatu yang sebetulnya tak ingin diumbar perusahaan. “Kalau semua perusahaan benar-benar jujur, pekerjaan kami selesai sebelum makan siang. Masalahnya, banyak yang tiba-tiba ‘sehat’ pada minggu terakhir Desember,” turut Auditor bernama Rifki, sambil tertawa tipis. “Kami lihat kas menggendut, utang jangka pendek mendadak mengecil. Begitu masuk Januari, semuanya kembali seperti semula. Seperti pasien yang prima hanya saat dokter datang.”

Window dressing, dalam definisi akademik, adalah tindakan memoles tampilan laporan keuangan atau kinerja perusahaan agar terlihat lebih baik dari keadaan sebenarnya. Ini biasanya dilakukan menjelang akhir periode pelaporan. Ringkasnya *window dressing* ini adalah seni merias kenyataan. Seperti melukis bunga di dinding retak. Indah dalam pandangan pertama, namun rapuh ketika disentuh.

Secara faktual, *window dressing* ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ; menggeser pengeluaran ke periode berikutnya. Meningkatkan pendapatan melalui pengakuan prematur. Memindahkan liabilitas dalam struktur jangka pendek ke jangka panjang. Menyulap angka rasio likuiditas dengan transaksi sementara sebelum tutup buku, dan seterusnya.

“Tekanan paling besar selalu dari pemegang saham,” ujar Ipam, mantan direktur keuangan sebuah perusahaan ternama. “Mereka ingin laporan cantik, dividen naik, harga saham stabil. Tidak ada yang benar-benar mau membahas masalah struktural. Jadi kadang... ya, laporan memang harus dipoles sedikit. Sedikit saja, katanya. Tapi sedikit itu menular.”

Itulah sebabnya *window dressing* ini dianggap bukan penipuan, hanya ‘penyesuaian kecil.’ Padahal setiap penyesuaian kecil itu sesungguhnya adalah retakan yang menunggu membesar.

Secara akademis, ada tiga faktor kunci yang membuat *window dressing* tumbuh subur di Indonesia. Pertama, struktur insentif yang salah. Sawir (2022) menunjukkan bahwa perusahaan dengan *CEO-oriented compensation* lebih rentan melakukan upaya kosmetik laporan. Saat bonus bergantung pada laba jangka pendek, kebenaran akuntansi mudah ditawar.

Kedua, lemahnya tata kelola. Lihat saja data skor ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yang menunjukkan rata-rata skor Indonesia masih di bawah Singapura dan Malaysia. Alasannya lantaran lemahnya komite audit. Kurangnya keahlian akuntansi di dewan komisaris. Dan dominasi pemegang saham

pengendali menciptakan ruang gelap tempat manipulasi tumbuh seperti jamur.

Ketiga, asimetri informasi. Catatan Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa 45% perusahaan memiliki tingkat *voluntary disclosure* yang rendah.

Nah, efek *window dressing* ini tidak berhenti pada kerapihan angka di laporan keuangan. Ia menciptakan distorsi struktural yang berbahaya. Pertama, Investor bisa salah menilai risiko. Studi BEI (2023) menemukan bahwa saham-saham yang terindikasi memanipulasi laporan memiliki volatilitas 20–30% lebih tinggi enam bulan setelah publikasi laporan.

Kedua, perbankan salah menilai kelayakan kredit. OJK mencatat sejumlah kasus di sektor manufaktur (2020–2023) di mana beberapa perusahaan yang memoles rasio likuiditasnya akhirnya gagal bayar pinjaman modal kerja. Ternyata praktek *window dressing* ini menciptakan ilusi solvabilitas.

Ketiga, kebijakan internal perusahaan menjadi tersesat. Sebagaimana ditunjukkan oleh Riset Pohan & Wiryawan (UNDIP, 2020) bahwa CFO yang mengandalkan laporan “dipoles” justru mengambil keputusan investasi yang salah arah, menyebabkan proyek merugi hingga miliaran rupiah. Pada kasus ini, *window dressing* ini ibarat kompas yang digeser dua derajat. Jangka pendek tidak terlihat. Jangka panjang membawa ekspedisi ke arah bencana.

Window dressing ini bukan sekadar pelanggaran akuntansi. Ia adalah utang moral. Ketika perusahaan merias wajahnya, ia menipu bukan hanya investor, pun dirinya sendiri. Ini seperti membersihkan kaca lampu dari luar tetapi membiarkan debu

pekat di bagian dalamnya. Cahayanya tampak terang, namun redup dari sumbernya.

Window dressing bukan hanya persoalan teknis, tetapi persoalan etika publik. Ia dapat dicegah bukan hanya dengan aturan, tetapi dengan budaya yang menghargai kejujuran sebagai strategi jangka panjang.

Begitulah, kecurangan kecil yang dibiarkan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang tumbuh akan menjadi budaya. Dan budaya manipulasi adalah awal keruntuhan, sebagaimana terbukti pada skandal Jiwasraya (2018–2020) dan Asabri (2019) di mana praktik *mark-up*, pengaburan nilai aset, dan ilusi valuasi berperan besar dalam menutup kerugian bertahun-tahun.

Untuk membatasi ilusi akibat window dressing, ada sejumlah langkah struktural yang bisa ditempuh. Pertama, transparansi berbasis teknologi. Seperti penerapan *real-time data analytics* dan *continuous auditing* oleh OJK dan auditor independen

Kedua, perbaikan tata kelola. Seperti penguatan komite audit, peningkatan kapasitas dewan komisaris, dan disclosure remunerasi manajemen.

Ketiga, mekanisme sanksi yang tegas. Seperti sanksi administratif OJK yang masih relatif ringan. Perlu peningkatan denda, larangan manajerial, hingga proses pidana bila diperlukan.

Keempat, edukasi investor melalui kampanye membaca laporan keuangan secara kritis, tidak hanya terpaku pada rasio-rasio kosmetik.

Catatan Kritis

Window dressing adalah seperti menutup retakan tanggul dengan cat putih. Pada hari pertama semuanya tampak baik baik saja. Pada hari keseratus retakannya semakin membesar. Akibatnya air menembus dengan ganas.

Bahaya *window dressing* tidak terletak pada kosmetiknya, tetapi pada konsekuensi epistemiknya, dimana keputusan ekonomi diambil di atas data yang menipu.

Akibatnya, Investor salah menilai risiko, lalu menanam modal pada tanah yang sebenarnya rapuh. Regulator kehilangan visibilitas, sehingga potensi krisis tidak terdeteksi. Manajemen perusahaan hidup dalam delusi, membuat kebijakan berdasarkan narasi yang mereka buat sendiri. Pasar kehilangan kepercayaan, dan akhirnya kalang kabut, saat kebenaran terungkap.

Praktik *window dressing* ini, jika dibiarkan, dapat mengantarkan perusahaan pada penyakit kronis, seperti pengambilan risiko berlebih, *moral hazard*, hingga skandal akuntansi. Sejarah keuangan internasional—dari Enron hingga Lehman Brothers—adalah kuburan besar ilusi yang dipoles terlalu mengkilap.

Pada akhirnya, bahaya *window dressing* adalah bahaya dari setiap ilusi. Ia melemahkan kemampuan kita membaca kenyataan. Dalam dunia ekonomi maupun kehidupan, jendela yang terlalu mengkilap kadang justru menyilaukan. Sehingga yang kita butuhkan bukan kilau palsu, namun kilau yang jernih. Agar kita dapat melihat dunia apa adanya, dan membuat keputusan keuangan yang pantas dan terbaik bagi masa depan.(*)



KETIKA “WAJAR” SECARA KEUANGAN BELUM TENTU “HALAL”

DI RUANG rapat itu, seorang auditor menatap berlembar-lembar laporan keuangan yang tampaknya sempurna. Tak ada selisih angka disana. Tak ada juga pelanggaran standar keuangan disana. Semua tampak “wajar.”

Di sudut lain di kompleks perkantoran di bilangan segitiga emas Jakarta, seorang auditor syariah mengajukan pertanyaan yang tak tertulis dalam angka ; apakah transaksi-transaksi dalam laporan keuangan ini halal ?

Nah, di sinilah perbedaan mendasar antara audit konvensional dan audit syariah bermula. Perbedaannya bukan saja pada pendekatan auditnya melainkan pada cara memaknai kebenaran auditnya.

Selama ini, audit konvensional menjadi tulang punggung kepercayaan pasar global. Acuannya sebut saja standar IFRS dan *International Standards on Auditing* (ISA), yang

memastikan laporan keuangan tersaji secara fair, atau dengan kata lain tidak menyesatkan.

Hingga akhirnya terjadi krisis finansial global 2008, yang menjadi pengingat penting bagi kita semua, dimana banyak perusahaan ternama yang dinyatakan “wajar tanpa pengecualian,” namun ironisnya saat itu bisnisnya tetap saja runtuh dan bangkrut.

Masalahnya sebagaimana diungkap akademisi seperti Power (1997) dalam *The Audit Society* bahwa audit modern itu cenderung terjebak dalam ritual kepatuhan formal, sehingga kehilangan dimensi etis nya.

Berangkat dari kekosongan dimensi etis itulah, maka lahirlah audit syariah. Dimana kewajaran saja tidak cukup sebagai ukuran audit. Pun, harus disertai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam yang bebas dari riba, gharar, dan maisir (AAOIFI, 2010). Artinya, laporan keuangan bisa saja benar secara akuntansi, namun bermasalah secara etis dan melanggar norma agama.

Secara teoritik, audit konvensional beroperasi dalam relasi *agen-prinsipal*, dimana manajemen harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemegang saham. Teori ini muncul dan diperkuat oleh teori keagenan Jensen & Meckling (1976)

Berbeda dengan audit konvensional, audit syariah mengandaikan bahwa akuntabilitas tidak berhenti pada standar manusia. Ia harus berlanjut dan bersandar kepada norma-norma agama.. Konsep ini berakar pada tradisi *hisbah*.

Sebuah sistem pengawasan dalam peradaban Islam yang menekankan pentingnya mengedepankan keadilan dan moralitas publik. (Kamali, 2003).

Dalam praktiknya, auditor syariah tidak hanya memeriksa bukti transaksi. Pun memastikan akad (kontrak) sesuai dengan fatwa ulama, sebagai contohnya fatwa DSN-MUI di Indonesia. Di sini, audit bukan lagi menjadi sekadar profesi, pun juga menjadi amanah agama.

Perbedaan berikutnya terletak pada ruang lingkupnya. Audit konvensional fokus pada laporan keuangan. Ia bekerja seperti dokter yang memeriksa tekanan darah dan detak jantung perusahaan. Selama beragam indikatornya normal, perusahaan dianggap sehat.

Sebaliknya, audit syariah bekerja seperti seorang filsuf sekaligus dokter. Ia tidak hanya memeriksa "tubuh" perusahaan. Pun juga memeriksa "jiwanya". Objek auditnya mulai dari produk, proses, hingga budaya organisasi, dan seterusnya

Penelitian Haniffa & Hudaib (2007) menunjukkan bahwa pelaporan dalam perspektif Islam tidak melulu seputar finansial saja, pun mencakup dimensi etika dan sosial. Itulah sebabnya, audit syariah kerap kali mencakup pemeriksaan distribusi zakat, keadilan bagi nasabah, hingga dampak sosial investasi, dan seterusnya.

Antara Standar Manusia dan Norma Ilahi

Audit konvensional bergantung pada standar profesional yang dinamis, yang dibentuk oleh lembaga seperti IAASB dan terus berkembang mengikuti kompleksitas ekonomi global.

Berbeda dengan audit konvensional, audit syariah memiliki fondasi ganda, yaitu standar profesional dan standar nilai ilahiyah. Rujukan auditornya bukan saja pada ketentuan AAOIFI, juga harus memahami Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa ulama.

Dusuki (2008), berpendapat bahwa sistem keuangan syariah tidak bisa dilepaskan dari tujuan maqasid al-shariah. Sebut saja ; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, audit tidak hanya memastikan kepatuhan prosedural, pun juga menjaga tujuan etis dari keberlangsungan aktivitas ekonomi.

Catatan Kritis

Tujuan akhir audit konvensional tidak lain adalah efisiensi pasar. Memastikan investor mendapatkan informasi yang akurat untuk mengambil keputusan.

Audit syariah bergerak lebih jauh lagi, mencakup kemaslahatan umat. Ia ingin memastikan bahwa sistem keuangan tidak hanya efisien, juga adil dan berkelanjutan.

Studi oleh Chapra (2000) menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam menolak pemisahan antara efisiensi dan etika, dimana audit syariah menjadi instrumen menjaga keseimbangannya.

Nah, Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah global, berada di persimpangan dua sistem ini. Otoritas seperti OJK dan DSN-MUI terus mendorong integrasi audit syariah dalam tata kelola lembaga keuangan. Sejumlah kendala masih menghadang. Mulai dari keterbatasan auditor memahami sekaligus akuntansi modern dan fikih muamalah, hingga peliknya kompleksitas produk keuangan kontemporer.

Pada akhirnya, audit konvensional dan audit syariah bukanlah dua kutub yang saling meniadakan. Keduanya adalah dua cara membaca realitas ekonomi. Yang satu memastikan angka tidak berbohong. Yang lain memastikan angka tidak melanggar norma agama.

Dan...

Di tengah dunia yang semakin terobsesi pada kuantifikasi dewasa ini, audit syariah mengingatkan kita bahwa tidak

semua yang benar itu baik. Dan tidak semua yang terlihat wajar itu benar di hadapan nilai-nilai moral dan agama.

Mungkin, tantangannya di masa depan, bukan lagi memilih salah satunya. Melainkan merajut keduanya, agar sistem keuangan tidak hanya transparan, juga bermartabat dan memberi manfaat kepada banyak orang. Weleh, weleh, weleh. (*)

[illegible]

TENTANG PENULIS



LAHIR di Makassar, 03 Desember 1966. Pria apa adanya ini, menempuh pendidikannya dari TK, SD, SMP, hingga SMA di kota Palu, Sulawesi Tengah. Hingga akhirnya Lulus S1 Manajemen di Universitas Tadulako, Palu di tahun 1992. Antara Tahun 2000 hingga 2003 sempat kuliah S2 Filsafat di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, namun tak selesai.

Dari kecil lelaki ini gemar berorganisasi. Saat masih berseragam putih biru (SMP, red) ia sudah aktif di organisasi seperti OSIS, Pramuka dan organisasi extra sekolah, Pelajar Islam Indonesia (PII). Dan menjadi Sekretaris Umum Pengurus Wilayah (PW-PII) Sulawesi Tengah periode 1990/1991. Sewaktu di kampus, ia aktif di Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Ketika hijrah ke Jakarta, ia aktif di GPII hingga menjadi Sekretaris Jendral Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP-GPII) periode 2008-2013.

Debutnya sebagai wartawan di Jakarta di mulai dari wartawan hingga menjadi Pimpinan Redaksi tabloid mingguan Manusia dan Peristiwa (MAP), dari tahun 1998 hingga 2001. Setelah itu, ia menjadi wartawan sekaligus Pimpinan Perusahaan tabloid bulanan Koran2an Slank, yang bermarkas di Potlot, Jakarta Selatan, dari tahun 2002 hingga 2003.

Saat bekerja di PT Rana Indah Cemerlang dari tahun 2004 hingga 2007, lelaki ini menjadi sutradara film pendek, seperti video profil LSM Partnership, DPD RI, dll, Juga menjadi sutradara videografi, yang kemudian dikemas dalam bentuk buku digital (CD-ROM). Sebut saja, profil kabupaten Pinrang, profil bupati Sleman. Pun, profil kabupaten Buol, dan profil kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah.

Setelah meraih gelar profesi *Certified Financial Planner* (CFP®) di FISIP UI, tahun 2013. Sejumlah kursus telah ia ikuti. Diantaranya pelatihan sekolah pasar modal level 1 dan level 2 di Bursa Efek Indonesia. Juga mengikuti sekolah pasar modal syariah level 1 dan level 2, yang diselenggarakan oleh BEI bekerja sama dengan sejumlah sekuritas ternama di Jakarta. Di tahun yang sama, persisnya April 2013, ia mengikuti *Futures Trading Basic Class* yang merupakan program edukasi JFX Academy. Tahun itu juga, ia berhak atas gelar profesi QWP™ (*Qualified Wealth Planner*) yang diselenggarakan oleh QWP Academy.

Nah, selama kurun waktu 2013 hingga 2017, ia menjadi penulis kolom di harian Media Alkhairaat yang mengulik seputar topik tentang perencanaan keuangan syariah. Kumpulan tulisannya kemudian di bukukan di tahun 2022,

dengan judul ; "Tata Keuangan Keluarga Anda Secara Syariah." Buku lainnya tentang keuangan keluarga, terbit tahun 2025, berjudul ; Bijak Kelola Keuangan Keluarga Sesuai Syariah Islam," "Lika-Liku Keuangan Keluarga." Dan "Esai-Esai Keuangan Keluarga" yang terbit tahun 2026.

Ia juga banyak menulis seputar budaya dan politik khususnya relasi budaya pop dan pilkada serentak 2024, di sejumlah media online seperti ; Nusantata News dan Kaidah. Id. Kumpulan tulisannya itu, kemudian dijadikan buku yang diterbitkan tahun 2025, dengan judul : "Mengulik Geliat Budaya dan Politik."

Selain itu, ia juga rajin menulis puisi, cerpen dan berbagai isu ekonomi, budaya, dan politik di sejumlah media online seperti Kompasiana, Kumparan, dan Tribun Palu, dll. Puisi dan cerpennya dimuat di sejumlah buku antologi, seperti buku antologi puisi berjudul ; "Kenangan." Begitu juga sejumlah cerpennya dimuat di buku antologi cerpen, seperti ; "Berani Bahagia," "Cinta Tanpa Syarat," "Menangis Dalam Doa," "Binar Mata, Di Setiap Cahaya, Terdapat Namamu, Ibu," "Menuju Terang," "Kopi & Manusia," "Pelitaku," "Diantara Nafas," dan "Ada Ridha-Nya." Selain itu, buku kumpulan cerpennya berjudul : "Manusia dan Peristiwa, dengan segala kerumitan eosin " terbit tahun 2025. Serta buku antologi cerpen berjudul "Denyut Langkah Kehidupan,' dan 'Antologi Esai "Cerita Dibalik Peristiwa," yang terbit tahun 2026.

Buku lainnya yang terbit di tahun 2025 berjudul ; "Lebih Dekat Dengan Sulawesi Tengah," "Prioritas Kepuasan Kerja di industri Asuransi," dan "Jangan Atur Tuhan."(*)

[illegible]

SERTIFIKAT HAKI

 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM	
SURAT PENCATATAN CIPTAAN	
Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:	
Nomor dan tanggal permohonan	: EC002026089305, 17 Juni 2026
Pencipta	
Nama	: Aislamuddin
Alamat	: Jl. Batu 1/2, Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Aislamuddin
Alamat	: Jl. Batu 1/2, Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Buku
Judul Ciptaan	: Antologi Esai: Menelusik Dunia Ekonomi dan Keuangan
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 27 Mei 2026, di Kab. Indramayu
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor Pencatatan	: 001286692
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.	
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	
	a.n. MENTERI HUKUM DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL u b Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko.SH.MH. NIP. 196912261994031001
Disclaimers:  1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan. 2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara. 3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan meminda kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.	

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire surface, providing a guide for handwriting or typing. The paper is otherwise completely empty, with no margins, text, or other markings.

BUKU kumpulan esai ini lahir dari sebuah perjalanan intelektual yang mencoba membaca denyut ekonomi bukan hanya sebagai catatan statistik. Pun, sebagai lanskap batin manusia yang selalu bernegosiasi dengan harapan dan ketakutannya.

Esai-esai di dalam buku ini berusaha menggali apa yang sering tersembunyi di balik keputusan-keputusan ekonomi dan keuangan, baik itu soal nilai, motif, luka, ambisi, pun ilusi dibalik keputusan itu.

Melalui pendekatan naratif-ilmiah dan sentuhan filosofis, buku ini ingin menjadi kompas kecil. Sebab, memahami ekonomi pada akhirnya adalah pantulan bagaimana cara kita memahami hidup, bermimpi, bekerja dan bertahan hidup.



SCAN ME

Penerbit Adalah
@penerbitadulab
www.penerbitadulab.id
@penerbitadulab

Layanan Pembaca:
0812-2115-1025

ISBN 978-634-289-492-7



9 786342 894927